

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor publik merupakan suatu organisasi yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang atau jasa publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Secara kelembagaan, yang termasuk sektor publik antara lain: badan pemerintahan, organisasi politik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi nirlaba. Pada saat ini, kegiatan usaha dibagi atas dua bagian yakni usaha yang berorientasi laba (organisasi bisnis) dan usaha yang tidak berorientasi laba (organisasi nirlaba). Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi laba. Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber dayanya dari sumbangan para anggota dan donatur yang tidak mengharapkan imbalan apapun.

Yayasan merupakan salah satu bagian dari organisasi nirlaba. Pada dasarnya yayasan bukanlah suatu istilah yang asing didengar oleh masyarakat saat ini. **Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.16 tahun 2001 yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial,**

keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota¹. Masyarakat cenderung memilih bentuk yayasan karena proses pendiriannya sederhana, tanpa memerlukan pengesahan dari pemerintah, serta persepsi masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak. Kegiatan-kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh yayasan antara lain adalah memberikan santunan kepada anak yatim piatu, memberikan layanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat kurang mampu, memberikan bantuan kepada korban bencana, dan lain sebagainya.

Sejalan dengan semakin luasnya kesempatan untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu permasalahan untuk dibahas, peran yayasan atau lembaga nirlaba yang digerakkan oleh masyarakat sendiri menjadi semakin penting. Kini organisasi nirlaba berbentuk yayasan bergerak dalam berbagai variasi bentuk kegiatan. Selain itu area pelayanan juga semakin melebar bahkan dari segi ukuran lembaga nirlaba tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai raksasa dalam dunia bisnis.

Umumnya, yang membedakan transaksi pada yayasan dengan organisasi laba adalah dengan adanya transaksi penerimaan sumbangan. Namun demikian dalam praktek organisasi nirlaba sering tampil dalam berbagai bentuk sehingga seringkali sulit dibedakan dengan organisasi bisnis pada umumnya. Pada organisasi nirlaba cenderung tidak ada suatu kepemilikan organisasi yang mutlak. Karena biasanya yayasan didirikan oleh beberapa orang maupun kelompok. Modal untuk mendirikan yayasan ini juga bisa didapatkan melalui pinjaman.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan

Sedangkan untuk kebutuhan operasionalnya bisa didapatkan dari pendapatan yakni sumbangan atau jasa yang diberikan kepada publik. Namun hal ini berakibat pada pengukuran jumlah dan kepastian arus kas masuk dan keluar yang menjadi ukuran penting bagi para pemakai dari laporan keuangan yayasan tersebut, misalnya seperti donatur, kreditur, pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Organisasi semacam ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan bisnis pada umumnya.

Dalam perkembangan perekonomian tidak dapat dipungkiri bahwa akuntansi memberikan peranan yang penting dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Akuntansi diperlukan oleh pemerintah, perusahaan laba, sosial dan organisasi nirlaba. Akuntansi diperlukan dalam hal memperoleh data-data keuangan yang penting, dan kemudian menyampaikannya dalam bentuk laporan, sehingga dapat dijadikan landasan untuk mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Dilihat dari sisi manajemen, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, sedangkan dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Yayasan pendidikan merupakan salah satu contoh dari bentuk yayasan. Akuntansi dibutuhkan oleh yayasan pendidikan untuk menghasilkan informasi keuangan maupun untuk meningkatkan mutu pada organisasi itu sendiri. Lembaga pendidikan secara mudah dapat dikatakan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata. Perkembangan pendidikan yang begitu cepat dan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memperhatikan tingkat

perkembangan pendidikan nasional untuk menghasilkan lembaga pendidikan yang berkualitas, memerlukan dana yang besar. Dana tersebut didapatkan dari bantuan pemerintah dan juga didukung dengan adanya kewajiban yang dibayarkan oleh wali siswa, serta masyarakat yang memang menyumbangkan dana maupun tanah untuk digunakan untuk operasional perguruan. Guna memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada wali siswa, pemerintah dan donatur, yayasan pendidikan dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau standar yang telah ada. Dengan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan yayasan maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan konsisten melakukan *social control* terhadap jalannya pengelolaan yayasan dan juga dapat memberikan dampak positif dalam mencapai perkembangan pada yayasan pendidikan. Dengan adanya acuan dalam melakukan pencatatan atas laporan keuangan juga akan mempermudah pihak pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, dengan demikian organisasi mampu melaksanakan tanggungjawab serta laporan keuangan yang dihasilkan bersifat relevan.

Oleh karena itu, laporan keuangan yayasan pendidikan harus disusun berdasarkan standar yang berlaku untuk organisasi nirlaba yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba. Standar pelaporan ini dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Bagi yayasan pendidikan, PSAK No.45 berguna untuk menunjukkan hasil pertanggungjawaban pihak perguruan atas

penggunaan sumber daya yang dipercayakan atau disumbangkan oleh masyarakat selaku wali siswa, donatur, kreditur dan juga pemerintah kepada yayasan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK No.45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yayasan meliputi:

- 1. Laporan Posisi Keuangan**
- 2. Laporan Aktivitas**
- 3. Laporan Arus Kas**
- 4. Catatan Atas Laporan Keuangan²**

Namun dalam pelaksanaannya, laporan keuangan yayasan pendidikan yang disusun oleh bendahara masing-masing sekolah sangat kurang dinilai akuntabilitasnya sebagai bahan pertimbangan serta alat ukur kinerja bagi perguruan. Pada umumnya, proses akuntansi yang biasanya dilakukan oleh yayasan pendidikan adalah mencatat penerimaan dan pengeluaran ke buku harian kas, kemudian penerimaan dan pengeluaran dipindahkan ke dalam catatan rekap bulanan. Untuk mencatat piutangnya Yayasan Pendidikan tidak mencatat ke buku piutang melainkan mencatatkannya ke daftar penerimaan. Proses selanjutnya, Yayasan Pendidikan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba-rugi. Jika laporan keuangan perguruan hanya disajikan dengan bentuk yang sesederhana itu, maka persentase perolehan dana dari luar menjadi kurang dan informasi keuangan dinilai kurang relevan dan belum andal. Hal itu terbukti dari penelitian para peneliti terdahulu dan pengamatan peneliti dari

² Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45

beberapa artikel dan kejadian yang terjadi di perguruan pada umumnya mengenai pemahaman dan penggunaan PSAK No. 45 sebagai standar dalam pelaporan keuangan yayasan pendidikan, masih ada yang belum menerapkan PSAK No.45 dalam pelaporan keuangannya. Hal tersebut juga didasari karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia pada lembaga pendidikan yang masih kesulitan dalam menyajikan laporan keuangan. Selain itu pengetahuan dan keterampilan penggunaan teknologi informasi oleh sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan juga masih sangat kurang, dan hanya ada beberapa yayasan pendidikan yang sudah menggunakan aplikasi teknologi informasi dalam menjalankan tugasnya.

Yayasan pendidikan sebagai salah satu organisasi *non profit* harus benar-benar dapat mempertanggungjawabkan segala informasinya karena menyangkut kepentingan publik yang ada. Salah satu bentuk pertanggungjawaban adalah dengan adanya transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan laporan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang ada. Maka dari itu diperlukan tenaga pengelola keuangan yang benar-benar mempunyai kemampuan praktik keuangan (akuntansi), serta mempertanggungjawabkan informasi. Hal tersebut dapat meminimalisir kesenjangan informasi keuangan antara yayasan pendidikan dengan para *stakeholders* sebagai penyedia sumber daya organisasi.

Penerapan PSAK No. 45 pada organisasi nirlaba pernah diteliti oleh beberapa peneliti diantaranya penelitian yang dilakukan Fonda (2011), Repi, dkk (2011), Hasunah (2015), Prasetyo dan Firmansyah (2018), Atufah, dkk (2018) disimpulkan bahwa penerapan PSAK No. 45 oleh beberapa yayasan pendidikan

sebagai organisasi nirlaba masih belum menerapkan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangannya dengan kata lain masih menggunakan cara sederhana yakni hanya menyajikan laporan kas masuk dan kas keluar. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas dan Mustikawati (2015), Maulana dan Mahmuda (2015), Sugiharto (2016) yang juga melakukan penelitian mengenai penerapan PSAK No.45 dengan hasil penelitian menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan oleh beberapa lembaga pendidikan telah sesuai dengan standar yang berlaku. Adanya kesesuaian dan ketidaksesuaian tersebut menimbulkan pertanyaan sejauh manakah penerimaan, penyajian, dan penerapan PSAK No. 45 yang telah dilakukan oleh organisasi nirlaba khususnya oleh yayasan pendidikan. Berdasarkan pada hasil pengamatan pada penelitian terdahulu ditemukan banyak kesenjangan yaitu masih banyaknya Yayasan Pendidikan yang belum menerapkan PSAK 45 dan adanya penelitian di pondok pesantren yang masih menggabungkan antara PSAK 45 dengan PSAK ETAP. Selain itu penelitian mengenai penerapan PSAK 45 di yayasan pendidikan juga masih sedikit, sehingga sumber referensi yang digunakan terbatas dan hasil penelitian yang pernah dilakukan menunjukkan hasil yang sama.

Mengingat adanya tuntutan atas akuntabilitas dan transparansi serta pentingnya laporan keuangan yang disusun oleh organisasi nirlaba khususnya yayasan pendidikan, maka pembahasan secara mendalam mengenai pelaporan keuangan yang mengacu pada PSAK No. 45 perlu untuk diteliti secara lebih mendalam lagi.

Sesuai dengan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penerapan PSAK No.45 sebagai pedoman dalam menyusun pelaporan keuangan yayasan pendidikan dengan mengadakan penelitian kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Melalui penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana kebijakan akuntansi dan praktiknya dalam pengelolaan laporan keuangan pada yayasan pendidikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal *online*, artikel, *websites*, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang sesuai dengan topik yang berhubungan dengan pelaporan yayasan pendidikan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul **“PELAPORAN KEUANGAN YAYASAN PENDIDIKAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 45”**.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan langkah awal yang akan dilakukan karena hasilnya akan menjadi penuntun bagi langkah-langkah selanjutnya. Hal ini dilakukan agar penelitian dapat terarah dan hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan sampai pada tahap pembahasan.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka secara garis besar masalah yang dapat dirumuskan adalah **“ Bagaimanakah Penyusunan Pelaporan Keuangan Yayasan Pendidikan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai bagaimana penyusunan pelaporan keuangan di yayasan pendidikan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian dapat memberikan peluang untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis baik dalam teori dan pembelajaran baru mengenai pelaporan keuangan di yayasan pendidikan.

2. Bagi yayasan pendidikan/ lembaga pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi sumber informasi yang dapat digunakan oleh manajemen yayasan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi pengembangan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama dikemudian hari.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Organisasi Nirlaba

Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba adalah organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter).

Nickels, McHugh dalam Rusliaman Siahaan berpendapat bahwa :

Organisasi nirlaba (*nonprofit organization*) adalah suatu organisasi yang tujuan-tujuannya tidak mencakup penciptaan laba pribadi bagi pemilik atau pengelolanya. Organisasi nirlaba seringkali berusaha mencari keuntungan finansial, tetapi keuntungan-keuntungan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan sosial atau pendidikan dari organisasi dan bukannya untuk keuntungan pribadi.³

Menurut Anthony dan Young dalam Triyuwono memberikan deskripsi bahwa organisasi nirlaba sebagai organisasi yang tujuannya adalah sesuatu di luar menerima keuntungan untuk para pemiliknya, biasanya bertujuan untuk memberikan pelayanan. Dalam hal pertanggungjawaban keuangan, organisasi

³ Rusliaman Siahaan, **Pengantar Bisnis**, Edisi Pertama: Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2012, hal.3

nirlaba tidak memperoleh modal ekuitas dari para investor luar, kecuali modal ekuitas mereka donasikan.

Organisasi nirlaba terdiri dari gereja, sekolah, derma publik, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa relawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintahan.

Karakteristik organisasi nirlaba menurut Rahayu adalah sebagai berikut:

- 1. Sumber daya organisasi berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.**
- 2. Menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan mendapatkan laba, dan jika suatu organisasi menghasilkan laba, maka jumlah laba tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut.**
- 3. Tidak ada kepemilikan seperti pada organisasi bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi.⁴**

Organisasi nirlaba membutuhkan pengelolaan yang berbeda dibandingkan dengan organisasi laba dan pemerintahan. Pengelolaan organisasi nirlaba serta

⁴ Wahyuningsih, Herman Karamoy, Dhullo Afandy, "Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101". E- Jurnal Akuntansi Going Concern vol. 13 No.2, tahun 2018 hal 514.

pencapaian kinerja organisasi nirlaba tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan berdasarkan dengan konteks hidup dan potensi kemanusiannya. Sifat sosial dan kemanusiaan sejati merupakan ciri khas pelayanan organisasi nirlaba. Manusia menjadi pusat sekaligus agen perubahan dan pembaharuan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan kesejahteraan, kesetaraan gender, keadilan, dan kedamaian, bebas dari konflik dan kekerasan.

2.1.2 Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.⁵ Di Indonesia yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 7 September 2004 menyetujui undang-undang ini, dan presiden Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri mengesahkannya pada tanggal 6 Oktober 2004.

Sebagai organisasi, termasuk yayasan memiliki tujuan yang spesifik dan unik yang dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Tujuan yang bersifat kuantitatif mencakup pencapaian laba maksimum, penguasaan

⁵ Rusliaman siahaan, **Op. Cit**, hal 65

pangsa pasar, pertumbuhan organisasi, dan produktivitas. Sementara tujuan kualitatif dapat disebutkan sebagai efisiensi dan efektivitas organisasi, manajemen organisasi yang tangguh, moral karyawan yang tinggi, reputasi organisasi, stabilitas, pelayanan kepada masyarakat, dan citra perusahaan.⁶

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Permohonan pendirian yayasan dapat diajukan kepada kepala kantor wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan yayasan. Yayasan yang telah memperoleh pengesahan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI).

Dari ketentuan undang-undang yayasan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat pendirian yayasan yaitu:

1. Didirikan oleh satu (1) orang atau lebih
2. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya
3. Harus dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
4. Harus Memperoleh pengesahan Menteri
5. Diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia
6. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan
7. Nama yayasan harus didahului dengan kata “ Yayasan”

⁶ Diyani Ade Rizky, Yazid Yud Padmono, “*Analisis Penerapan PSAK NO. 45 Pada Yayasan Masjid Al-Falah Surabaya*”. E-jurnal ilmu & Riset Akuntansi Vol.2 No.7, tahun 2013 hal.6

Bagi, yayasan yang belum terdaftar harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian menyesuaikan dengan anggaran dasar.

Yayasan merupakan salah satu jenis organisasi nirlaba. Yayasan memiliki orientasi berbeda-beda tergantung tujuan yayasan tersebut. Adapun bentuk usaha yayasan atau sektor yayasan ialah:

- a. Sektor pendidikan; formal dan non formal
- b. Sektor sosial
- c. Organisasi Masyarakat (ORMAS)
- d. Sektor kesehatan
- e. Sektor Keagamaan
- f. Diperkenankan memiliki badan usaha dibawah yayasan, yang hasil operasinya digunakan untuk kepentingan yayasan.

2.1.3 Akuntansi Yayasan

Akuntansi adalah proses mencatat dan mengolah data transaksi dan menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan. Selain itu akuntansi juga menginterpretasikan atau membaca informasi akuntansi yang diterimanya.

Accounting Principles Boards (APB) dalam statement No.4 tahun 1970 dalam Adanan silaban dan Berliana lumban gaol mendefenisikan akuntansi sebagai berikut: **“Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan**

atas suatu entitas, yang dimaksudkan berguna bagi para pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi”⁷.

Akuntansi juga dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang pemakai dan sudut pandang proses kegiatan. Ditinjau dari sudut pandang pemakainya akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Sedangkan dari sudut pandang proses kegiatan, akuntansi proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menunjukkan bahwa kegiatan akuntansi merupakan tugas yang kompleks dan menyangkut berbagai kegiatan. Dan yayasan merupakan salah satu pemakai jasa akuntansi

Dalam Undang-Undang No 28 tahun 2004 pada pasal 5 ayat 1 tentang yayasan yang berbunyi sebagai berikut:

“ Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada pembina, pengurus, dan pengawas”

Berikut ini adalah istilah yang sering digunakan di dalam akuntansi yayasan:

⁷ Adanan Silaban dan Berliana Lumbangaol, **Teori Akuntansi**, Edisi Pertama: Universitas HKBP Nommensen, Medan, tahun 2019, hal. 4

1. Pembatasan Permanen, adalah pembatasan dalam penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh pemberi sumber daya atau penyumbang agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan secara permanen. Yayasan diijinkan untuk menggunakan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut.
2. Pembatasan temporer, adalah pembatasan penggunaan sumber daya oleh penyumbang, agar sumber daya tersebut dapat dipertahankan sampai dengan periode tertentu atau sampai dengan terpenuhinya keadaan tertentu
3. Sumbangan terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut dapat bersifat permanen atau temporer.
4. Sumbangan tidak terikat, adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang.

2.1.4 Akuntansi Untuk Sektor Pendidikan

Akuntansi untuk sektor pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan suatu informasi bagi institusi pendidikan. Informasi tersebut akan berguna untuk pengambilan keputusan baik yang berhubungan dengan internal maupun eksternal lembaga.

Menurut Bastian, adapun peran dan fungsi akuntansi sektor pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan agar

berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan. Siklus akuntansi pendidikan dikelompokkan kedalam tiga tahapan , sebagai berikut:

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi serta bukti pencatatan, kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam bukti harian atau jurnal, dan memindah bukukan (posting) dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya kedalam akun buku besar

2. Tahap Pengikhtisaran

Penyusunan neraca saldo berdasarakan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian penyusunan kertas kerja atau neraca lajur, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutup, dan pembuatan ayat jurnal pembalik.

3. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini, yang dilakukan adalah membuat laporan surplus defisit (laporan aktivitas), laporan arus kas, neraca saldo serta catatan atas laporan keuangan.

2.1.4 Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Pelaporan keuangan merupakan struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi akuntansi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial negara.

Menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* (SFAC) mendefeniskan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana

penyampaian informasi tentang kondisi dan kinerja perusahaan terutama yang bersifat keuangan. Informasi tersebut dimaksudkan akan membantu pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan.⁸

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dikelola oleh suatu entitas dengan tujuan memberikan informasi atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan. Untuk pihak eksternal hal ini memberikan gambaran berupa kegiatan operasi suatu badan atau organisasi, untuk donatur laporan keuangan memberikan gambaran sehat atau tidaknya organisasi yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk memberikan kembali sumbangan atau tidak. Manfaat yang diperoleh oleh pihak pengelola adalah berupa evaluasi kinerja dan perbaikan kinerja penentuan capaian masa depan yang ingin diperoleh. Halim (2008) Menjelaskan bahwa Laporan keuangan merupakan **hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak⁹**

Di dalam PSAK 45 menurut IAI disebutkan bahwa, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan donatur yang tidak mengharapkan pembayaran kembali bagi anggota, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.

⁸ Adanan Silaban dan Berliana Lumbangaol, **Ibid**, hal 31

⁹ Melisa Olivia Tanor, "**Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk**". Jurnal EMBA. Vol. 3 No. 3 September 2015. Hal. 639-649

Tujuan laporan keuangan juga untuk memberikan informasi guna pengambilan keputusan. Hal ini memerlukan suatu pengungkapan yang layak mengenai data keuangan dan informasi relevan lainnya. Akan tetapi pertanyaannya adalah:

1. Untuk siapa informasi itu diungkapkan
2. Apa tujuan informasi tersebut
3. Berapa banyak informasi itu harus diungkapkan.

2.1.5 Unsur-Unsur Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

Berikut adalah unsur-unsur laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor.45:

1. Laporan Posisi Keuangan/ Neraca

Di dalam akuntansi keuangan, neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai asset, liabilitas, dan asset netto serta informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada periode tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lain dapat membantu donatur, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk menilai:

- a. Kemampuan entitas nirlaba memberikan jasa secara berkelanjutan
- b. *Likuiditas*, dilihat dari aktivitas lancar yang dimiliki
- c. *Fleksibilitas* keuangan, dilihat dari utang aset yang dimiliki

- d. Kemampuan memenuhi kewajibannya, dilihat dari jumlah hutang serta harta lancar yang dapat digunakan untuk melakukan pelunasan hutang.

Dalam laporan posisi keuangan entitas nirlaba terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan karena berbeda dengan entitas bisnis. Lebih lanjut, di dalam PSAK No.45 komponen dalam laporan posisi keuangan mencakup:

1. Aset

Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya dan dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar.

2. Liabilitas

Liabilitas disajikan menurut urutan jatuh temponya dan dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.

3. Aset bersih

Aset bersih disajikan menjadi aset bersih tidak terikat, aset bersih terikat temporer, dan aset bersih terikat permanen.

Berikut ini bentuk laporan posisi keuangan yayasan yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran anatomis pelaporan keuangan yayasan secara umum.

Tabel 2.1

Laporan Posisi Keuangan		
31 Desember 20X0 dan 20X1		
	20X0	20X1
Aktiva :		
Kas dan setara kas	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Piutang	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Persediaan dan biaya dibayar dimuka	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Piutang lain-lain	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Aktiva terikat untuk investasi dalam tanah, bangunan, dan peralatan	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Tanah, bangunan, dan peralatan	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Investasi jangka panjang	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Jumlah Aktiva	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Kewajiban dan Aktiva bersih :		
Hutang dagang	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Pendapatan diterima dimuka yang dapat dikembalikan	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Hutang lain-lain	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Hutang Wesel	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Kewajiban tahunan	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Hutang jangka panjang	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Jumlah kewajiban	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Aktiva Bersih :		
Tidak terikat	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Terikat temporer	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Terikat permanen	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Jumlah Aktiva Bersih	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx
Jumlah Kewajiban dan Aktiva Bersih	Rp. xxx.xxx.xxx	Rp. xxx.xxx.xxx

Tabel Bentuk Laporan Posisi Keuangan Yayasan

Sumber : Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik

2. Laporan Aktivitas

Laporan aktivitas adalah laporan yang menyajikan perubahan jumlah aset bersih selama suatu periode, dimana perubahan tersebut terjadi karena aktivitas yang terjadi pada entitas nirlaba tersebut. Tujuan laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aset neto, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu donatur, anggota, kreditur, dan pihak lain untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, menilai upaya, kemampuan, dan kesinambungan entitas nirlaba dalam memberikan jasa, serta menilai pelaksanaan tanggung jawab dan kinerja manajer.

Laporan aktivitas terdiri dari dua bagian besar yaitu pendapatan dan beban/biaya lembaga. Pendapatan yang berasal dari sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen atau terikat temporer, tergantung ada tidaknya pembatasan. Beban disajikan dalam laporan aktivitas berdasarkan kriteria fungsional. Dengan demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung. Beban biaya untuk kegiatan program utama dianjurkan untuk ditambah dengan informasi tambahan berupa klasifikasi beban menurut sifatnya. Sedangkan aktivitas pendukung meliputi semua aktivitas selain program jasa utama meliputi aktivitas jasa umum, pencairan dana dan pengembangan anggota. Selain pendapatan dan

beban laporan aktivitas juga menyajikan mengenai keuntungan dan kerugian yang diakui dari aktivitas investasi dan aset lain/ liabilitas sebagai penambah atau pengurang aset neto tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.

Berikut ini disajikan tabel bentuk laporan aktivitas keuangan yayasan yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran anatomis pelaporan keuangan yayasan secara umum.

Tabel 2.2

Tabel Bentuk Laporan Aktivitas Yayasan

Yayasan Laporan Aktivitas Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1	
Perubahan Aktiva Bersih Tidak Terikat :	
Pendapatan dan Penghasilan :	Rp. xxx.xxx.xxx
Sumbangan	xxx.xxx.xxx
Jasa Layanan	xxx.xxx.xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx.xxx.xxx
Penghasilan investasi lain-lain	xxx.xxx.xxx
Penghasilan bersih investasi jangka panjang belum direalisasi	xxx.xxx.xxx
Lain-lain	xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan dan Penghasilan Tidak Terikat	Rp. xxx.xxx.xxx
Aktiva Bersih yang Berakhir Pembatasannya :	
Pemenuhan program pembatasan	Rp. xxx.xxx.xxx
Pemenuhan pembatasan perolehan peralatan	xxx.xxx.xxx
Berakhirnya pembatasan waktu	xxx.xxx.xxx
Jumlah Aktiva yang Telah Berakhir Pembatasannya	Rp. xxx.xxx.xxx
Jumlah Pendapatan, Penghasilan, dan Sumbangan Lain	Rp. xxx.xxx.xxx
Beban dan Kerugian	
Program	Rp. xxx.xxx.xxx
Manajemen dan umum	xxx.xxx.xxx
Pencairan dana	xxx.xxx.xxx
Jumlah Beban	Rp. xxx.xxx.xxx
Kerugian akibat kebakaran	xxx.xxx.xxx
Jumlah Beban dan Kerugian	Rp. xxx.xxx.xxx
Kenaikan Jumlah Aktiva Bersih Tidak Terikat	Rp. xxx.xxx.xxx
Perubahan Aktiva Bersih Terikat Temporer	
Sumbangan	Rp. xxx.xxx.xxx
Penghasilan investasi jangka panjang	xxx.xxx.xxx
Penghasilan bersih terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	xxx.xxx.xxx
Aktiva bersih terbebaskan dari pembatasan	xxx.xxx.xxx
Penurunan Aktiva Bersih Terikat Temporer	Rp. xxx.xxx.xxx
Perubahan Aktiva Bersih Terikat Permanen	
Sumbangan	Rp. xxx.xxx.xxx

Penghasilan investasi jangka panjang	xxx.xxx.xxx
Penghasilan bersih terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	xxx.xxx.xxx
Kenaikan Jumlah Aktiva Bersih Terikat Permanen	Rp. xxx.xxx.xxx
Kenaikan Aktiva Bersih	Rp. xxx.xxx.xxx
Aktiva Bersih Awal Tahun	Rp. xxx.xxx.xxx
Aktiva Bersih Akhir Tahun	Rp. xxx.xxx.xxx

Sumber: Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik

3. Laporan Arus Kas (*statement of cash flows*)

Laporan arus kas adalah suatu laporan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan pembiayaan/pendanaan serta kenaikan/penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode. Laporan arus kas dalam entitas nirlaba menurut PSAK 45 bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSAK Nomor 45 (revisi 2009): laporan arus kas atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bab 7 dengan tambahan sebagai berikut:

- a. Aktivitas pendanaan:
 - (i) Penerimaan kas dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali yang penggunaannya dibatasi dalam jangka panjang
 - (ii) Penerimaan kas dari sumber daya dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk pemerolehan, pembangunan, dan pemeliharaan aset tetap atau peningkatan dana abadi

- (iii) Bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya dalam jangka panjang.
- b. Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan non-kas , misalnya sumbangan berupa bangunan atau aset investasi.

Secara singkat laporan arus kas menerangkan bagaimana saldo kas awal lembaga dengan penambahan dan pengurangan hingga mencapai saldo akhir per tanggal neraca. Hal yang penting dari laporan ini adalah keterkaitannya dengan laporan aktivitas. Laporan arus kas menyajikan sumber arus kas dari tiga golongan besar yakni: kelompok operasi (*operating activities*), kelompok investasi (*investing activities*), dan kelompok pendanaan (*financing activities*).

Berikut ini disajikan tabel bentuk laporan arus kas keuangan yayasan yang ditunjukkan untuk memberikan gambaran anatomis pelaporan keuangan yayasan secara umum.

Tabel 2.3

Tabel Bentuk Laporan Arus Kas Yayasan

Yayasan Laporan Arus Kas

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1	
Arus kas dari aktivitas operasi :	
Kas dari pendapatan jasa	Rp. xxx.xxx.xxx
Kas dari penyumbang	xxx.xxx.xxx
Kas dari pendapatan lain-lain	xxx.xxx.xxx
Bunga dan dividen yang diterima	xxx.xxx.xxx
Penerimaan lain-lain	xxx.xxx.xxx
Bunga yang dibayarkan	xxx.xxx.xxx
Kas yang dibayarkan kepada karyawan dari supplier	xxx.xxx.xxx
Utang lain-lain yang dilunasi	xxx.xxx.xxx
Kas Bersih yang diterima (digunakan) dari aktivitas operasi	Rp. xxx.xxx.xxx
Arus kas dari Aktivitas Investasi :	
Ganti rugi dari asuransi kebakaran	Rp. xxx.xxx.xxx
Pembelian peralatan	xxx.xxx.xxx
Penerimaan dari penjualan investasi	xxx.xxx.xxx
Pembelian investasi	xxx.xxx.xxx
Kas bersih yang diterima (digunakan) dari aktivitas investasi	Rp. xxx.xxx.xxx
Arus kas dari aktivitas pembiayaan :	
Penerimaan kontribusi terbatas dari :	
Investasi dalam endowment	Rp. xxx.xxx.xxx
investasi dalam endowmentberjangka	xxx.xxx.xxx
Investasi bangunan	xxx.xxx.xxx
Investasi perjanjian tahunan	xxx.xxx.xxx
	Rp. xxx.xxx.xxx
Aktivitas pembiayaan lain :	
Bunga dan dividen terbatas untuk reinvestasi	Rp. xxx.xxx.xxx
Pembayaran kewajiban tahunan	xxx.xxx.xxx
Pembayaran utang wesel	xxx.xxx.xxx
Pembayaran kewajiban jangka panjang	xxx.xxx.xxx
	Rp. xxx.xxx.xxx
Kas bersih yang diterima (digunakan) dari aktivitas pembiayaan	Rp. xxx.xxx.xxx
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	Rp. xxx.xxx.xxx
Kas dan setara kas pada awal tahun	xxx.xxx.xxx
Kas dan setara kas pada akhir tahun	Rp. xxx.xxx.xxx
Rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :	
Perubahan dalam aktivitas bersih	xxx.xxx.xxx
Penyesuaian untuk rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi :	xxx.xxx.xxx
Penyusutan	xxx.xxx.xxx
Kerugian akibat kebakaran	xxx.xxx.xxx
kerugian akturial dari kewajiban tahunan	xxx.xxx.xxx
Penurunan persediaan dan biaya dibayar dimuka	xxx.xxx.xxx
Kenaikan piutang lain-lain	xxx.xxx.xxx
Kenaikan utang usaha	xxx.xxx.xxx

Penurunan penerimaan dimuka yang dapat dikembalikan	xxx.xxx.xxx
Penurunan dalam utang lain-lain	xxx.xxx.xxx
Sumbangan terikat untuk investasi jangka panjang	xxx.xxx.xxx
Bunga dan dividen terikat untuk investasi jangka panjang	xxx.xxx.xxx
Penghasilan bersih yang terealisasi dan belum terealisasi dari investasi jangka panjang	xxx.xxx.xxx
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	Rp. xxx.xxx.xxx
Data tambahan untuk aktivitas investasi dan pembiayaan non-kas :	
Peralatan yang diterima sebagai hibah	xxx.xxx.xxx
Pembebasan premi asuransi kematian, nilai kas yang diserahkan	xxx.xxx.xxx

Sumber : Indra Bastian, Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari laporan lainnya, yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan-perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berupa rincian dari suatu perkiraan yang disajikan seperti misalnya aktiva tetap. Catatan atas laporan keuangan ini juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai kebijakan akuntansi yang dilakukan seperti metode penyusutan apa yang akan digunakan dalam menghitung biaya depresiasi aktiva tetap, dan berapa estimasi usia pakai aktiva dan lain sebagainya

Dalam PSAK 45 secara rinci tujuan laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai:

- a. Jumlah dan sifat aset, liabilitas, dan aset netto entitas nirlaba
- b. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah nilai dan sifat aset netto
- c. Jenis dan jumlah arus masuk dan arus keluar sumber daya dalam satu periode dan hubungan antara keduanya

- d. Cara entitas nirlaba mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman, dan melunasi pinjaman, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap likuiditasnya.
- e. Usaha jasa entitas nirlaba .

2.2 Sumber Pendapatan Yayasan

Menurut Pahala Nainggolan pendapatan dalam yayasan merupakan satu hal yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan pendapatan pada perusahaan atau bisnis laba.¹⁰ Pada yayasan, pendapatan diperoleh dari berbagai sumber. Namun, cara penggunaannya berbeda tergantung jenis pendapatannya. Penggunaan pendapatan tergantung pada keputusan manajemen sendiri.

Sumber pendapatan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang dan barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, berupa:

a. Wakaf

Wakaf adalah kekayaan yang diserahkan kepada yayasan untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kepentingan umum. Yayasan menerima wakaf barang atau hal lainnya supaya bisa dikelola dengan maksimal. Biasanya diberikan oleh pemerintah, lembaga atau badan usaha dan masyarakat umum.

b. Hibah

¹⁰ Pahala Nainggolan, **Akuntansi Keuangan Yayasan**, Edisi Pertama, Jakarta, 2010 , hal 67.

Hibah umumnya bersifat pengajuan dari yayasan. Hal ini biasanya berasal dari instansi atau yayasan yang lain. Selain itu hibah memiliki konsekuensi pertanggungjawaban berupa laporan terkait dengan penerimaan dan realisasi hibah tersebut.

c. Hibah Wasiat

Hibah wasiat adalah bantuan yang diberikan seseorang atau instansi kepada yayasan karena wasiat dari seseorang yang telah meninggal. Sebelumnya bantuan ini diberikan dengan harapan dapat berkembang menjadi lebih besar lagi.

d. Perolehan Lain

Perolehan lain adalah pendapatan yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti:

1. Usaha komersil dibawah yayasan seperti: dividen dari perusahaan pemilik yayasan, usaha dagang, dan lain-lain
2. Hasil investasi harta yayasan seperti: bunga deposito, penjualan properti milik yayasan, dan lain-lain
3. Lain-lain seperti usaha dagang atau produksi sementara dari pameran, lelang, dan lain-lain.

Pendapatan yang diperoleh tersebut akan dibagi dalam tiga kategori berdasarkan pembatasan yang ditentukan oleh sumber pendapatan itu.

1. Pendapatan Tidak Terikat (*unrestricted*)

Sumbangan atau donasi yang diterima yang tidak menyebutkan penggunaan yang diinginkan oleh pemberinya adalah sumbangan yang termasuk dalam golongan sumbangan tidak terikat. Dengan demikian, yayasan memiliki kebebasan penuh untuk mengalokasikan penggunaannya.

2. Pendapatan Terikat Sementara (*temporarily restricted*)

Pendapatan ini umumnya diperoleh dari sumbangan yang diberikan secara khusus oleh pemberi menyebutkan tujuan penggunaannya serta jangka waktu penggunaannya.

3. Pendapatan Terikat Permanen (*restricted*)

Kategori sumber dana lain adalah sumber dana dengan batasan permanen. Sumber dana ini biasanya diperoleh dengan batasan yang jelas untuk penggunaannya dan diasumsikan bahwa waktu penggunaan selamanya. Artinya, hanya untuk tujuan yang dimaksud dan berlaku selamanya

2.3 Struktur Organisasi Yayasan

Struktur organisasi yayasan merupakan turunan dari fungsi, strategi dan tujuan organisasi. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2004, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :

a. Pembina

Organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang tersebut atau anggaran dasar. Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota pembina

adalah individu pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Anggota pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas.

b. Pengurus

Organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, dan pihak yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah individu yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai pembina atau pengawas. Pengurus yayasan diangkat oleh pembina berdasarkan keputusan rapat pembina untuk jangka waktu selama lima (5) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara.

c. Pengawas

Organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki sekurang-kurangnya satu (1) orang pengawas yang wewenang, tugas dan tanggungjawabnya diatur dalam anggaran dasar. Mereka yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah individu yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai pembina dan/atau pengurus. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di sejumlah tempat. Hasil penelitian tersebut dijadikan landasan dan pedoman dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitian dalam bentuk skripsi dan jurnal yang dijadikan acuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Elwifna Novri Fonda (2011)

Penelitian yang dilakukan oleh Fonda berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan pada Yayasan Abidin Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa Yayasan Pendidikan Abidin dalam proses pencatatan yayasan tidak membuat penyusutan untuk aktiva tetapnya, sehingga nilai aktiva tetap tidak menunjukkan nilai sebenarnya. Sementara dalam proses penyusunan laporan keuangan, yayasan hanya menyusun laporan neraca serta laporan laba-rugi dan tidak menyusun laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan keuangan Yayasan Abidin Pekanbaru belum sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45.

2. Wahyu Repi, Grace B-Mogi, Heince Wokan (2015 penelitian dengan judul Analisis Penerapan PSAK No.45 (Revisi 2011) Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba pada STIKES Muhammadiyah Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah STIKES Muhammadiyah Manado belum menerapkan penyusunan laporan

keuangan sesuai dengan format laporan keuangan nirlaba yang terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 45, karena untuk penyusunannya STIKES Muhammadiyah hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari yayasan yang bentuknya masih berupa neraca saldo.

3. Hasunah (2015)

Hasunah melakukan penelitian dengan judul Penyusunan Laporan Keuangan Yayasan Pendidikan Islam Menurut PSAK 45 (Studi kasus pada YPIS Raudlatut Thalabah di Kabupaten Kediri). Penelitian ini merupakan kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah YPIS Raudlatut Thalabah belum menyusun laporan keuangan melainkan hanya membuat catatan pemasukan dan pengeluaran kas.

4. Galuh Budi Astuti, Lis Lestari, F.X.Agung P J (2018)

Penelitian dengan judul Desain Sistem Informasi Akuntansi Berdasarkan SAK 45 untuk Pengelolaan Keuangan Yayasan Karmel Malang. Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Karmel Malang dalam pelaporan keuangannya belum sesuai dengan SAK 45, dan masih menggunakan cara sederhana. Hal tersebut karena kurangnya pemahaman dan belum adanya sistem akuntansi yang baik.

5. Intan Devi Atufah, Norita Citra Yuliarti, Dania Puspitasari (2018)

Penelitian dengan judul Penerapan PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan yang ada di Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Khairiyah belum sesuai dengan penyusunan laporan keuangan berdasarkan format penyusunan laporan keuangan yang ada pada PSAK No 45. Laporan keuangan yang ada hanyalah laporan arus kas mengenai pemasukan dan pengeluaran.

6. Hastoni, Bambang Pamungkas, dan Dinah Sobar Mustikawati (2015)
Penelitian dengan judul Analisis Penerapan PSAK 45 (Revisi 2011) Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Nirlaba (studi kasus pada Yayasan Dharma Setia Kosgoro). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Yayasan Dharma Setia Kasgoro sudah mengikuti dan menerapkan penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan PSAK 45 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Namun, terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang disajikan Yayasan Dharma Setia Kasgoro dengan laporan keuangan dalam PSAK 45. Perbedaan tersebut dapat terlihat dalam laporan posisi keuangan yang mana dalam posisi keuangan, aset

bersih terikat masih digabungkan antara aset bersih terikat permanen dengan aset bersih terikat temporer.

7. Jaka Maulana dan Annisa UI Mahmuda

Penelitian ini berjudul Pengaruh Penerapan PSAK No. 45 Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan menyebarkan kuesioner ke 15 yayasan pendidikan di kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Yayasan Pendidikan di Kota Bandung secara keseluruhan dalam pelaporan keuangannya telah menerapkan dan menyajikan sesuai dengan PSAK No. 45 dengan baik. Hal tersebut terlihat dari adanya pengaruh signifikan antara penerapan PSAK No. 45 terhadap kualitas laporan keuangan pada Yayasan Pendidikan di kota Bandung.

8. Nur Aziz Sugiharto (2016)

Penelitian ini berjudul Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba Bagi Yayasan Pendidikan (studi kasus pada Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia). Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Yayasan Pendidikan di Kota Bandung telah mengukur dan mengungkapkan serta menyajikan pelaporan keuangannya sesuai dengan prinsip yang berlaku yakni PSAK No. 45.

9. Carolina Permata Sari, Heri Yanto, dan Widiyanto (2016)

Penelitian ini berjudul *Penerimaan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Oleh Pengelola Keuangan Yayasan Pendidikan: Analisis Technology Acceptable Model*. Metode yang digunakan dalam penelitian metode kuantitatif dengan analisis jalur. Penelitian ini melibatkan 48 yayasan di kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh kompetensi pengguna terhadap persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan sikap penggunaan; dukungan teknologi terhadap persepsi kegunaan; persepsi kemudahan terhadap persepsi kegunaan, persepsi kemudahan terhadap niat penggunaan; serta sikap penggunaan terhadap niat penggunaan. Adanya pengaruh negatif norma subyektif terhadap persepsi kegunaan.

10. Della Aprilia Safitri, Maslichah, dan Afifuddin (2019)

Penelitian ini berjudul *Pengaruh Penerapan PSAK 45, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, dan Penggunaan Teknologi Informasi terhadap Laporan Keuangan Organisasi Sektor Publik studi empiris pada Yayasan-Yayasan di Kabupaten Malang*. Penelitian menggunakan 40 yayasan di kabupaten Malang sebagai sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 45, kompetensi SDM, pengendalian internal, dan penggunaan teknologi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam mendeskripsikan mengenai pelaporan keuangan yayasan pendidikan berdasarkan Pernyataan Standar Keuangan Akuntansi (PSAK) nomor 45, penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi penerapan pelaporan keuangan yayasan pendidikan berdasarkan PSAK No.45 di lembaga pendidikan Indonesia.

Menurut Denzin dan Lincoln dalam Anggito dan Johan:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹¹

Sehingga dalam memahami fenomena sosial serta fakta yang ada secara kompleks dan rinci, penelitian kualitatif akan mencari dan memperoleh informasi mendalam dan luas dari berbagai media informasi.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif non interaktif atau biasa disebut penelitian analitis. Penelitian kualitatif non interaktif dilakukan dengan melakukan pengkajian berdasarkan analisis dokumen. Peneliti mengumpulkan data dengan cara menghimpun, mengidentifikasi, dan

¹¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Cetakan Pertama: CV. Jejak, Sukabumi, 2018, hal. 7

menganalisis data untuk kemudian memberikan interpretasi terhadap konsep, kebijakan, peristiwa, yang secara tidak langsung diamati.

3.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2020 sampai selesai dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam mencari data penelitian seperti undang-undang, jurnal maupun peraturan-peraturan lain yang saling berkaitan dengan penelitian ini.

3.3 Unit Analisis

Unit analisis merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang diteliti. Unit analisis penelitian tersebut dapat berupa individu, kelompok, organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu yang sesuai dengan fokus permasalahannya. Buku, kitab suci, kebijakan-kebijakan atau gagasan, naskah, undang-undang, dongeng, dan lain sebagainya merupakan unit analisis yang berbentuk benda.

Unit analisis yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini adalah buku, jurnal online, skripsi online, dan artikel yang membahas tentang pelaporan keuangan yayasan pendidikan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi literatur. Penelitian kepustakaan (*Liberary Research*) adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan)

baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Teknik ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal, *websites*, dan literatur yang lain yang berhubungan dengan penelitian untuk memperoleh wawasan dan dasar teori sehingga bisa digunakan sebagai informasi serta menunjang pembahasan masalah penelitian ini.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Juliandi, dkk **“Data sekunder adalah data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitiannya”**.¹² Data aslinya tidak diambil oleh peneliti tetapi oleh pihak lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data dari peneliti terdahulu seperti pada: Yayasan Pendidikan Dharma Setia Kosgoro yang diteliti oleh Hastoni dkk, Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia yang diteliti oleh Nur Aziz Sugiharto, STIKES Muhammadiyah Manado yang diteliti oleh Wahyu Repi dkk, dan YPIS Raudlatut Thalabalah Kediri yang diteliti oleh Hasunah. Dan sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku dan jurnal online yang sudah terakreditasi yang diunggah dari situs internet seperti *Google Scholar*, *Google Book*, *Garuda Journal*, *Scrib.id*, dan *Academia.edu*.

3.5 Metode Analisa Data

Metode analisa data ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan ke unit-unit,

¹² Azuar Juliandi, Irfan, dan Saprinal Manurung, **Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi**, UMSU Pres, 2014 hal 66

memilih mana yang perlu dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dari penelitian kualitatif dilakukan mulai sejak awal sampai sepanjang proses penelitian ini berlangsung. Tahap awalnya mengadakan studi penelaahan kepustakaan terhadap jurnal maupun artikel terakreditasi yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Tahap selanjutnya yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk data yang lebih sederhana sehingga mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi. Pada hakekatnya penyederhanaan ini data ini merupakan upaya peneliti untuk mencari jawaban atas permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya.

Oleh karena itu, studi kepustakaan meliputi proses identifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka dan analisis dokumen yang memuat informasi berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model analisis non interaktif. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif terbagi menjadi empat tahap yaitu:

- a. Pengumpulan bahan-bahan atau data**
- b. Reduksi data**
- c. Penyajian data**
- d. Penyusunan kesimpulan**¹³

Penelitian ini akan dimulai dengan melakukan pengumpulan data-data dengan materi yang dibahas yaitu data mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45, dan peraturan perundang-undangan mengenai yayasan. Setelah itu, akan dilakukan pengkajian terhadap konsep yang dijelaskan

¹³ Umrati Hengki Wijaya, **Analisis Data Kualitatif: Teori, Konsep dalam Penelitian Pendidikan**, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020, hal.113-114.

dan digambarkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan No.45 dan peraturan perundang-undangan yayasannya tersebut. Kemudian dari hasil penjelasan dan penggambaran tersebut langkah selanjutnya ialah melakukan analisa berdasarkan kesesuaiannya di lapangan. Dengan demikian hasil penelitian dapat diperhatikan dari yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan dan menggambarkan hasil dan kesimpulan. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melihat tahun penelitian diawali dari yang paling mutakhir, sampai ke tahun yang paling lama. Membaca abstrak dari setiap penelitian lebih dahulu untuk memberikan penilaian apakah permasalahan yang dibahas sesuai dengan yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian. Mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan permasalahan penelitian. Untuk menjaga adanya unsur plagiat, para peneliti hendaknya mencatat sumber-sumber informasi dan menuliskannya di daftar pustaka

